

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM)**

**Pengabdian Masyarakat ini dibiayai
DIPA
Universitas Muhammadiyah Jambi**



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MELALUI PENGELOLAAN USAHA KREATIF**

TIM PELAKSANA

Etik Winarni, S.E., M.Ec.Dev (**NIDN. 1010048606**)

Iwan Ekaputra, S.E., M.M (**NIDN. 1006086804**)

Yolanda Sari.,SE.,M.Sc (1027088705)

Mustika.,SE.,MM (**NIDN. 1015108501**)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYA JAMBI
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul IbM	: Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan organisasi Non Profit
Daftar Mitra	
Nama Mitra Program IbM	: Ds. Lopak Alai, Kec.Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Ketua Pelaksana	
a. Nama Lengkap	: Etik Winarni, S.E., M.Ec.Dev
b. NIDN	: 1010048606
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
e. Bidang Keahlian	: -
f. Alamat kantor/Tlp/E-mail	: Jl. Pattimura, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, 082181510082/ etikwinarni88@gmail.com
Anggota 1	
a. Nama Lengkap	: Dr. Iwan Ekaputra, S.E., M.M
b. NIDN	: 1006086804
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ekonomi Manajemen
e. Bidang Keahlian	: -
Anggota 2	
a. Nama Lengkap	: Yolanda Sari., SE., M.Sc
b. NIDN	: 1027088705
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
e. Bidang Keahlian	: Ekonomi Pembangunan
Anggota 3	
d. Nama Lengkap	: Mustika., SE., MM
e. NIDN	: -
f. Jabatan Fungsional	: Lektor
h. Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
i. Bidang Keahlian	: Ekonomi Pembangunan
Lokasi Kegiatan Mitra	
a. Wilayah Mitra (Desa/Kec)	: Lopak Alai, Kec. Kumpeh Ulu
b. Kabupaten/Kota	: Kab. Muaro Jambi
c. Propinsi	: Jambi
d. Jarak PT ke Lokasi Mitra	: ± 63 Km
Luaran yang dihasilkan	: Metode Penyusunan Laporan Keuangan
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 1 Bulan
Biaya/ BOPTN	: Rp1.300.000,00

Jambi, 26 Juli 2023

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Ratih Rosita, S.E., M.E
NIDN. 1011118603

Ketua Tim IbM,

Etik Winarni, S.E., M.Ec.Dev
NIDN. 1010048606

Menyetujui:
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Prima Aulia Daniel., SE., M.E
NIDN : 195012121981031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Analisis Situasi.....	1
1.2. Perumusan Masalah	3
BAB II TARGET DAN LUARAN	5
2.1. Target.....	5
2.2. Luaran.....	5
BAB III METODE PELAKSANAAN	6
3.1. Khalayak Sasaran.....	6
3.2. Metode Penerapan IPTEK.....	6
3.3. Keterkaitan.....	7
3.4. Rancangan Evaluasi	7
3.5. Jadwal Pelaksanaan	8
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	9
4.1. Kinerja Lembaga Pengabdian Masyarakat	9
4.2. Kualifikasi Tim Pelaksana.....	11
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
5.1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	12
5.2. Pembahasan Hasil Kegiatan	15
BAB VI RENCANA TAHAP SELANJUTNYA	16
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
1.1. Kesimpulan.....	17
1.2. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Entitas semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan

jasa tersebut; (b) cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggung jawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya entitas nirlaba yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aset neto.

Laporan keuangan organisasi non profit/nirlaba/sector publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sector publik. Laporan keuangan ini merupakan implikasi bagi manajemen sector publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sector publik secara efektif. Akuntansi sector publik harus menghadapi tantangan dalam pelaporan keuangan ini yaitu mampukah akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitori akuntabilitas manajemen, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan.

Pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu , Kabupaten Muaro Jambi . Desa Lopak Alai merupakan Desa yang sangat luas memiliki satu Dusun yaitu Lopak Alai. Jumlah penduduk

sebanyak 7.160 jiwa dengan 1.200 Kepala Keluarga (KK). Luas daerah Desa Lopak Alai 669 hektar dengan areal sawah 280 hektar. Desa Lopak Alai secara fisik merupakan desa yang luas dengan masyarakat yang aktif. Desa ini sering mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Anggaran Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD). Secara ekonomis masyarakat Desa Lopak Alai merupakan kalangan menengah kebawah yang kehidupan sosialnya sangat harmonis dan teratur.

Bantuan dari pemerintah pusat yang sering diterima oleh Desa Lopak Alai membuat desa tersebut dituntut kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban terhadap publik. Pertanggungjawaban kepada publik dapat diinformasikan melalui laporan keuangan. Kondisi saat ini Desa Lopak Alai belum memiliki laporan keuangan yang memadai sesuai dengan laporan keuangan untuk organisasi non profit.

1.2. Perumusan Masalah

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan jasa atau layanan dan tidak bertujuan untuk mencari laba (keuntungan) dari aktivitas operasionalnya. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi nirlaba terhadap pengelolaan sumber daya. Di Indonesia, penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba khususnya Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap transparansi keuangan dan bertujuan untuk

menyeragamkan penyajian laporan keuangan desa sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, relevan, andal, dan memiliki daya banding yang tinggi. Organisasi nirlaba/sektor publik khususnya desa dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan sektor publik tidak dapat disamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya, karena organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan non-moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik. Berdasarkan latar belakang tersebut perumusan masalah pada kegiatan ini adalah bagaimana menyusun laporan keuangan yang diterapkan di Desa?

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka disusun target dan luaran yang diinginkan. Detail dari target dan luaran tersebut tercantum sebagai berikut.

2.1. Target

Adapun target yang ingin dicapai dalam program pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Membina Desa Lopak Alai sebagai desa yang tertib administrasi dalam pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Menjadikan Desa Lopak Alai sebagai desa binaan dalam semua aspek kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi , sehingga bisa menjadi desa percontohan.

2.2. Luaran

Sedangkan luaran yang diarpkan dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya program pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi khususnya dalam bidang pelaporan keuangan.
2. Hasil program pengabdian masyarakat ini disebarluaskan dalam bentuk pamflet dan diseminasi pada desa-desa lain.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah desa Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu , Kabupaten Muaro Jambi yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat desa dan Karangtaruna. Perangkat desa dan Karangtaruna sebagai pengguna anggaran mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan sumber dana kepada pemerintah dan masyarakat luas sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

3.2. Metode Penerapan Iptek

Metode penerapan Iptek dalam kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan dengan:

a. Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep-konsep mengenai organisasi nirlaba dan laporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi nirlaba.

b. Pendampingan

Metode pendampingan dimaksudkan memberikan contoh kasus kepada peserta untuk menyelesaikan praktik penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.

c. **Praktik Manual**

Praktik manual dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyusun kembali laporan keuangan organisasi tersebut berdasarkan data historis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

d. **Perkenalan Praktik dengan Software**

Perkenalan praktik dengan software dimaksudkan untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba secara komputerisasi dengan kriteria apabila praktik manual telah dikuasai.

3.3. Keterkaitan

Keterkaitan kegiatan ini dengan Universitas Muhammadiyah Jambi adalah Universitas Muhammadiyah Jambi melalui pelaksanaan kegiatan ini mampu mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diamanahkan oleh undang-undang. Bagi Desa Lopak Alai, Kec. Kumpeh Ulu , Kab. Muaro Jambi dan Pemerintah kegiatan ini akan mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga kepercayaan pengelolaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara tepat.

3.4. Rancangan Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan melalui review berkala dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kehadiran dan partisipasi peserta (sasaran) pada setiap kegiatan sejak persiapan sampai berakhirnya kegiatan mencerminkan keinginan dari peserta untuk mengetahui dan menerapkan hasil kegiatan ini.
2. Setiap laporan yang selesai dikerjakan dievaluasi.
3. Setiap kendala atau kesulitan dicarikan pemecahan masalahnya.
4. Di akhir kegiatan semua kegiatan dievaluasi.

3.5. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 1 hari, dengan teknis pelaksanaan di lapangan dan kegiatan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini ditampilkan dalam *bar-chart* berikut ini:

Kegiatan	Hari ke-1	Hari ke-1	Hari ke-1	Hari ke-1	Hari ke-1	Hari ke-1
Kegiatan Persiapan (dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat)						
Penjelasan Teoritis, Praktik, dan Pendampingan						
Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Desa Lopak Alai						
Evaluasi Berkala						
Perkenalan Praktik dengan Software						
Evaluasi Akhir Kegiatan						

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1. Kinerja Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi

Kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi sangat baik. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi merupakan unsur pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengembangkan dan meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa. Pengalaman selama ini serta keberhasilan dalam transformasi teknologi kepada masyarakat telah membuktikan betapa besar peran Universitas Muhammadiyah Jambi. Peran Universitas Muhammadiyah Jambi terhadap pengembangan institusi sangat besar artinya baik dalam bentuk temuan-temuan baru dibidang sains dan teknologi sehingga sumbangan Universitas Muhammadiyah Jambi diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti didalam membangun kampus sebagai masyarakat ilmiah dan pembangunan masyarakat pada umumnya serta Menjadi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang memiliki komitmen tinggi terhadap kegiatan ilmiah yang berkontribusi dan bersinergi mewujudkan keunggulan Visi Universitas Muhammadiyah Jambi.

4.2. Kualifikasi Tim Pelaksana

Sesuai dengan target dan luaran dari program IbM maka dibutuhkan kepakaran-kepakaran di bidang Ekonomi Akuntansi.

1. Ketua Tim IbM: Etik Winarni, S.E., M.Ec.Dev

Latar belakang di bidang Ekonomi Pembangunan, dengan spesialisasi Ilmu Ekonomi Makro, Publik, dan Mikro. Latar belakang dan pengalaman penelitian yang telah dilakukan sangat relevan dengan tema program IbM ini yang sangat dibutuhkan keahlian dalam bidang Ekonomian.

2. Anggota IbM: Dr. Iwan Ekaputra.,SE.,MM

Latar belakang di bidang Manajemen Keuangan dan Riset Keuangan, dengan spesialisasi Manajemen Keuangan. Latar belakang dan pengalaman penelitian yang telah dilakukan sangat relevan dengan tema program IbM ini yang sangat dibutuhkan keahliannya dalam bidang Pelaporan Keuangan.

3. Anggota IbM: Yolanda Sari.,SE.,M.Sc

Latar belakang di bidang Ekonomi dengan spesialisasi Ekonomi Moneter, Matematika. Latar belakang dan pengalaman penelitian yang telah dilakukan sangat relevan dengan tema program IbM ini yang sangat dibutuhkan keahliannya dalam bidang Pemeriksaan ekonomi.

4. Latar belakang di bidang Akuntansi, dengan spesialisasi Akuntansi Keuangan, Audit, Perpajakan, dan Sistem Informasi Akuntansi. Latar belakang dan pengalaman penelitian yang telah dilakukan sangat relevan dengan tema program IbM ini yang sangat dibutuhkan keahlian dalam bidang Pelaporan Keuangan. Pengalaman mengikuti berbagai organisasi sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan dilapangan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Sebagaimana kita ketahui bersama organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada profit yang sering juga disebut sebagai organisasi bisnis. Organisasi nirlaba dalam menjalankan kegiatannya tidak semata-mata di pengaruhi oleh profit (biasanya menggunakan istilah selisih lebih) dan jika hal tersebut terjadi selisih lebih tersebut akan digunakan untuk *stakeholder* atau kepentingan publik.

Di dalam organisasi nirlaba kepemilikan tidak seperti pada kepemilikan pada organisasi bisnis, artinya bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual dialihkan, atau ditebus kembali dan dana sumber daya organisasi nirlaba biasanya berasal dari sumbangan para donatur tanpa mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan. Walaupun donatur tidak mengharapkan adanya pengembalian atas sumbangan mereka, mereka tetap menginginkan pelaporan, dan pertanggung jawaban atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin tahu bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan publik buka untuk di gelapkan.

Menyusun laporan keuangan memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan apalagi memang untuk diterapkan pada organisasi nirlaba yang mempunyai *scope* yang kecil dan biasanya sumberdayanya kurang. Namun, hal

tersebut bukan menjadi alasan karena organisasi nirlaba dapat membuat laporan keuangan sederhana tanpa harus mengacu kepada standar pelaporan keuangan entitas nirlaba. Organisasi nirlaba yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah Desa Lopak Alai yang dalam pengelolaan keuangannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Harapannya dengan melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi kepada regulator, donatur dan pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan dana desa laporan keuangan yang harus dibuat Desa Lopak Alai, Kec. Kumpeh Ulu , Kab. Muaro Jambi diantaranya: Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa; Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Entitas nirlaba yang lainnya dapat menerapkan PSAK 45 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 45 laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk satu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Walau pelaporan akuntansi mengenai entitas nirlaba telah jelas

diatur dalam PSAK 45 tetap saja masih banyak organisasi nirlaba di Indonesia yang belum sanggup untuk melaksanakannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, keterbatasan sumber daya dan organisasi yang *scope* nya kecil menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan PSAK 45 belum banyak diterapkan.

Beberapa organisasi nirlaba telah mampu menerapkan PSAK 45 baik *full* mengacu pada PSAK 45 atau yang tidak hanya mengacu kepada PSAK 45 saja, beberapa organisasi nirlaba menggunakan pedoman tambahan hal ini mengingat organisasi nirlaba mempunyai karakteristik sendiri. Terdapat pula beberapa organisasi nirlaba yang telah menjalankan fungsi auditor independen dan menggunakan basis akrual dan mereka mem-*publish* laporan tersebut kedalam *web* masing-masing.

Sebagaimana yang telah penulis katakan sebelumnya organisasi nirlaba masih banyak yang belum menjalankan fungsi akuntabilitasnya dengan baik dan benar karena memang hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan. Sering kali kita berhadapan dengan organisasi nirlaba, dan perkembangannya juga cukup pesat di Indonesia terutama di bidang keagamaan dan pendidikan. Gereja-gereja baru berdiri, lembaga infaq yang semakin menjamur dan meningkat pesatnya jumlah sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat akan organisasi nirlaba berkembang pesat. Melalui perkembangan tersebut dan kemudahan akses informasi membuat publik sadar bagaimana organisasi nirlaba melakukan pengelolaan keuangan, bagaimana pemerintah sebagai regulator mengawasi kegiatan organisasi nirlaba. Memang

pada akhirnya semua hal tersebut akan bertumpu pada masyarakat bagaimana untuk menyikapi hal tersebut dan melakukan aksi tentunya.

5.2. Pembahasan Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ini adalah berupa penerapan iptek. Penerapan iptek dalam kegiatan ini adalah penyusunan laporan keuangan organisasi non profit yaitu di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu , Kabupaten Muaro Jambi . Desa Lopak Alai sering menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Dana Desa, Anggaran Desa, sehingga membuat desa tersebut dituntut kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban terhadap publik. Pertanggungjawaban kepada publik dapat diinformasikan melalui laporan keuangan. Kondisi setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat saat ini adalah Desa Lopak Alai sudah memiliki laporan keuangan yang memadai sesuai dengan laporan keuangan untuk organisasi non profit.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut :

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan.
2. Ketercapaian tujuan pelatihan.
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan.
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.

BAB VI

RENCANA TAHAP SELANJUTNYA

Dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat IbM ini masih terdapat beberapa permasalahan. Program ini belum dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat umum dikarenakan peserta adalah sebatas pada perangkat desa dan karangtaruna. Untuk rencana tahap selanjutnya akan dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pembinaan UMKM milik desa, sehingga tercipta desa binaan yang dapat dijadikan Desa Percontohan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Program pelatihan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jumlah peserta sesuai dengan targetan awal menunjukkan antusiasme peserta terhadap kegiatan ini. Keseluruhan materi yang direncanakan yang merupakan rencana awal maupun berdasarkan permintaan mitra telah dilaksanakan secara baik. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan yaitu perangkat desa dan karangtaruna tidak membawa laptop yang dapat menunjang kelancaran pelatihan.

7.2. Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki program selanjutnya diantaranya adalah :

1. Waktu pelaksanaan program yang lebih lama dan berkesinambungan,
2. Dilakukan pelatihan dan implementasi langsung pada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Oktaviani. 2003. "*Desentralisasi Pengambilan Keputusan, Pengendalian Akuntansi dan Kinerja Kantor Dinas*". Program studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang (tidak dipublikasikan).
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bodnar, George H., and Hopwood, William, S.,. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 9. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Gatot, Indra. 2005. "*Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Indonesia*". CV.Duta Nusindo. Semarang
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Jogjakarta: Penerbit Andi Offset. 2002.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sukirman, Djadja. 2008. Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik. *Makalah yang disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan*. Jambi. 24 Mei 2008.

LAMPIRAN

1. Justifikasi Anggaran Pengabdian Masyarakat

NO	RINCIAN BIAYA	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Honorarium <ul style="list-style-type: none">- Ketua Rp. 300.000- Anggota (4 Orang) @Rp 100.000	300.000 400.000
2	Bahan dan Peralatan Kegiatan <ul style="list-style-type: none">- Bahan habis pakai (kertas, tinta printer, spanduk)	300.000
3	Pelaksanaan Ceramah, diskusi dan pelatihan <ul style="list-style-type: none">- Konsumsi (nasi kotak) : 15 orang x 25.000	375.000
4	Laporan Kegiatan	100.000
	Jumlah	1.475.000

Dokumentasi Kegiatan

